



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAHRUDIN
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 246384

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.775.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m²/64 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 748 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 395 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 2809 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m²/36 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 2382 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
7. Tanah Seluas 970 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/70 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 547.000.000

1. MOTOR, BENELLI SPORT (BS 250) PE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000



3. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE 1.2 L EXCEED-H Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. MOBIL, NISSAN SERENA HIGHWAY STAR A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	64.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.393.000.000
III. HUTANG	Rp.	1.500.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.893.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.